



INSTITUT AGAMA ISLAM
PANGERAN DIPONEGORO NGANJUK
<http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id>

**PRAKTIK DISKURSIF INTEGRASI-INTERKONEKSI ILMU
PENGETAHUAN AMIN ABDULLAH SEBAGAI PERGULATAN
INTELEKTUALISME DI INDONESIA**

Moch. Muwaffiqillah

Institut Agama Islam Negeri Kediri
Email: wafiqmuhammad@iainkediri.ac.id

<p>Info Artikel Submit : 29 Juli 2021 Revisi : 16 Agustus 2021 Diterima : 25 Agustus 2021 Publish : 27 September 2021</p>	<p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah menganalisis praktik destruktif dalam pemikiran Amin Abdullah terkait integrasi-interkoneksinya sebagai wujud proses intelektualisme di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan library reasearch untuk menganalisis pemikiran-pemikiran Amin Abdullah tentang Integrasi-Interkoneksi yang mewujudkan dirinya sebagai bentuk pergulatan intelektualisme di Indonesia. Ada pun proses yang penelitian ini meliputi, dokumentasi pustaka yang terhubung dengan tema dan topik, serta penyusunan data-data yang telah ditemukan menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan: 1) Praktik diskursif “Integrasi-Interkoneksi Ilmu Pengetahuan” yang dimainkan oleh Amin Abdullah sebagai pergulatan intelektualisme di Indonesia. Dimulai dengan membongkar epistemologi dan metodologi pengetahuan keagamaan lalu menawarkan konsepsi integrasi-interkoneksi agama dan sains. 2) Tidak hanya ‘dipungut’ paksa dan dicangkokkan begitu saja dalam PTKI, tetapi keilmuan yang dikembangkan memiliki nilai distingtif dengan yang berada di perguruan tinggi umum.</p>
<p>Kata kunci</p>	<p><i>Praktik Diskursif, Integrasi-Interkoneksi Sains, Amin Abdullah, Intelektualisme Indonesia.</i></p>

Pendahuluan

Barangkali nama Amin Abdullah sudah sedemikian masyhur dibelantara pengetahuan di Indonesia. Jaring Laba-laba (*Spider web*) sedemikian melegenda di kalangan PTKI khususnya. Tak kurang beberapa karya telah ditulis dalam rangka mengurai pemikirannya, mulai dari artikel ringan hingga karya serius dengan label *Integrasi-Interkoneksi*

Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-) Person Knowledge and Institution, jilid 1 dan 2 yang ditulis Waryani Fajar Riyanto.

Dalam dunia pendidikan Indonesia, UIN Sunan Kalijaga dulunya IAIN Sunan Kalijaga, di mana Amin Abdullah mengabdikan pengetahuan dan dedikasinya, bukanlah perguruan tinggi yang mentereng dibanding dengan perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kemenristek-dikti (sekarang) atau kemendikbud atau kemendiknas (dahulu) seperti UI, UGM, ITB dan masih banyak lagi lainnya. Perguruan tinggi di bawah Kemenristek-dikti atau kemendiknas seperti itu selalu menjadi destinasi utama para lulusan SLTA yang menginginkan kuliah. Sudah begitu para alumnus sudah malang melintang di dunia birokrasi negeri ini dan bahkan menjadi teknokrat sepanjang negara ini berdiri.

Tetapi transformasi IAIN menjadi UIN telah mengangkat martabat dan muruah PTKI menjadi diperhitungkan dalam kancah perguruan tinggi nasional. Perubahan ini tentu bukanlah layaknya permainan sulap atau sihir. Di dalamnya tentu terjadi perdebatan dan pergulatan dalam rentang waktu yang tidak sedikit. Problem bahwa perguruan tinggi ini berada dalam naungan Kemenag saja sudah menjadi persoalan tersendiri belum lagi perdebatan banyak hal yang menyita tenaga dan pikiran.¹

Karenanya tulisan ini hendak membaca Praktik Diskursif “Integrasi-Interkoneksi Ilmu Pengetahuan” Amin Abdullah sebagai Pergulatan Intelektualisme di Indonesia. Bagaimana para sarjana agama ini merangsek untuk mendapat tempat dalam panggung pengetahuan Indonesia. Menempatkan perguruan tinggi mereka tetap sebagai perguruan tinggi keagamaan tetapi menyelenggarakan pendidikan umum sebagaimana perguruan tinggi umum di bawah keneristek-dikti tetapi tetap dibawah kendali para sarjana agama—tentu tulisan ini tidak berpretensi untuk menunjukkan bahwa Amin Abdullah dengan segala pemikirannya sebagai satu satunya atau sebagai faktor utama terangkatnya derajat ilmu pengetahuan keagamaan.

¹ Lihat M. Amin Abdullah, “Etika *Tauhidik* sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama (Dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke arah Teoposentrik-Integralistik) dalam M. Amin Abdullah, dkk. *Integrasi Sains-Islam: Mempersatukan Epistemologi Islam dan Sains* (Yogyakarta: Suka Press, 2004).

Amin Abdullah dan Integrasi-Interkoneksi Ilmu Pengetahuan

Gagasan integrasi interkoneksi Amin Abdullah dimulai dari polemik yang diuraikannya dalam buku *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yang terbit tahun 1996.² Nuansa polemikal dari buku itu menyiratkan gugatannya pada kenyataan bahwa studi agama berada dalam dua posisi kontradiktif yakni normatif atau historis. Atau jika dalam bahasa Richard C. Martin terjebak dalam dikhotomi *fideistic subjectivism* dan *scientific objectivism*.³

Dalam konteks normativitas pemahaman terhadap keislaman selama ini sering dipahami sebagai dogma yang baku. Hal ini karena pada umumnya normativitas ajaran wahyu ditelaah lewat pendekatan doktrinal teologis. Pendekatan ini berangkat dari teks kitab suci yang pada akhirnya membuat corak pemahaman yang tekstualis dan skripturalis. Sedangkan dalam konteks historisitas, agama bisa ditelaah dalam konteks historisitas pemahaman dan interpretasi orang perorang atau kelompok-perkelompok terhadap norma ajaran yang dipeluknya.⁴

Selanjutnya untuk mengurai polemik itu ia menawarkan pendekatan integrasi interkoneksi. Asumsi dasar yang dibangun pada paradigma ini adalah bahwa dalam memahami kompleksitas fenomena kehidupan yang dihadapi dan dijalani manusia, setiap bangunan keilmuan apapun baik ilmu agama, keilmuan sosial, humaniora, maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri. Kerjasama, saling membutuhkan, dan bertegur sapa antar-disiplin ilmu justru akan dapat memecahkan persoalan yang dihadapi oleh manusia, karena tanpa saling bekerja sama antar-disiplin ilmu akan menjadikan *narrowmindedness*.⁵

Karenanya Amin memulakan dengan perlunya sebuah pendekatan agama yang berwajah ganda (*double face*) dalam studi agama di Indonesia, yakni pendekatan yang bersifat

² Buku itu merupakan kumpulan makalah dan atau artikel di Jurnal yang merentang antara tahun 1991 samapi dengan 1994. Lihat M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996).

³ Richard C. Martin, "Islam and Religious Studies: An Introductory Essay" dalam Martin *Approach to Islam in Religious Studies* (Arizona: The University of Arizona Press, 1985), 2.

⁴ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). v.

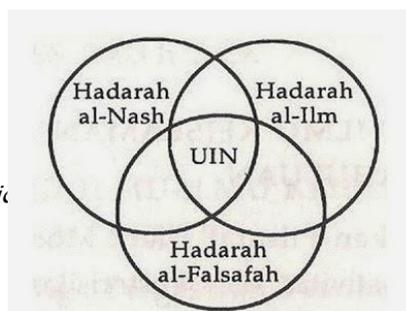
⁵ M. Amin Abdullah, "Membangun Kembali Filsafat Ilmu-ilmu Keislaman: Tajdid dalam Perspektif Filsafat Ilmu" dalam A. Syafi'i Ma'arif, dkk., *Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban*, (ed.) Mifedwil Jandra dan M. Safar Nasir (Yogyakarta: MT PPI & UAD Press, 2005), 45. Penjelasan tentang integrasi-interkoneksi ini diurai secara lengkap dalam buku biografi M. Amin Abdullah. Lihat Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-...)* (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013) 765.

teologis-normatif dan sekaligus pendekatan yang bersifat historis-kritis. Kedua pendekatan itu tidak terpisah satu sama lain, melainkan menyatu dalam satu kesatuan yang utuh, ibarat sekeping mata uang logam (*two sides in one coin*) di mana antara kedua permukaannya menyatu dalam satu kesatuan yang kokoh, namun dapat dibedakan. Walaupun dalam praksisnya di antara keduanya kadang terjadi ketegangan (*tension*), namun ketegangan tersebut diharapkan bersifat kreatif (*creative tension*) bukannya ketegangan yang bersifat destruktif (*destructive tension*). Ketegangan kreatif selamanya akan mewarnai masyarakat beragama yang bersifat pluralistik seperti di tanah air.⁶

Integrasi dan interkoneksi antar-disiplin ilmu, baik dari keilmuan sekuler maupun keilmuan agama, akan menjadikan keduanya saling terkait satu sama lain, “bertegur sapa”, saling mengisi kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Dengan demikian, ilmu agama (ilmu keislaman) tidak lagi berkuat pada teks-teks klasik, tetapi juga menyentuh pada ilmu-ilmu sosial kontemporer. Dengan paradigma ini, maka tiga wilayah pokok dalam ilmu pengetahuan, yakni natural sciences, social sciences, dan humanities tidak lagi berdiri sendiri tetapi akan saling terkait satu dengan lainnya.⁷



Jaring Laba-laba (*Spider Web*)



⁶Abdullah, *Studi Agama*. vi.

⁷M. Amin Abdullah, *Islamic Studies* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

tan Integratif-Interkonektif,

Posisi dan Pelembagaan Integrasi-Interkoneksi Pengetahuan

Socio-Academic Setting: Ruang Publik Pengetahuan Indonesia

Ruang publik pengetahuan kita secara dikhotomis terbagi menjadi pendidikan dibawah naungan Kemendikbud sekarang Kemenristek-Dikti dan dibawah naungan Kemenag. Pendidikan yang berada dalam susunan Kemenristek-Dikti atau yang selama ini kita kenal dengan pendidikan umum menempati skala prioritas utama karena telah memenuhi cita dan selera pasar. Pendidikan seperti ini telah berhasil mengembangkan dinamikanya dengan berdialektika terhadap proses sosial yang sedang mengalir menuju muara industrialisasi.

Perguruan Tinggi di bawah naungan Kemenristek-Dikti sudah sedemikian mapan dalam ruang publik pengetahuan kita. Dalam diri mereka terkandung legitimasi sebagai agen pengetahuan yang sejati. Kementerian mereka pemegang palu otoritas tentang apakah sesuatu itu disebut pengetahuan atau bukan. Dalam pundak mereka-lah amanat “mencerdaskan kehidupan” yang termuat dalam UUD 1945 dipasrahkan.

Sedangkan yang kedua adalah pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama atau Kemenag. Pendidikan dengan klasifikasi seperti ini menempati strata kedua dibandingkan dengan pendidikan dibawah naungan Kemenristek-Dikti. Semacam pendidikan *mu'adalah* bagi perguruan tinggi yang biasa kita sebut “Umum” itu. Pendidikan Kemenag adalah bentuk yang lebih sistematis dari pendidikan agama yang dahulu dikembangkan oleh dunia pesantren. Pendidikan semacam IAIN pada awal berdirinya tahun 1960 adalah gagasan seorang KH. Wahid Hasyim dengan semangat agar lembaga ini menjadi wahana untuk menempa ilmu pengetahuan yang lebih tinggi dan profesional. Artinya lembaga ini di orientasikan menjadi semacam agen perubahan dari masyarakat yang

tradisionalis menjadi masyarakat modern dengan berbasiskan keagamaan yang kokoh. Karena itulah, pengetahuan dan keilmuan agama di Perguruan Tinggi Agama adalah ilmu yang sudah diberi semangat “perubahan” yang membedakan pengetahuan agama pada umumnya. Maka dengan semangat perubahan itu pula perguruan tinggi agama berusaha mensinergikan antara tuntutan sikap keberagamaan yang kokoh disatu pihak dan tuntutan perubahan sosial dipihak lain.

Ide dan gagasan menjadi Universitas Islam disambut dengan riuh bukan hanya karena *spreading* keilmuannya mejadi lebih luas. Lebih daripada itu bisa dianggap untuk meningkatkan martabat perguruan tinggi keagamaan dalam konteks pengetahuan Indonesia. Karena itu, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) disibukkan oleh upaya untuk ‘mendamaikan’ ilmu agama dan ilmu umum yang sampai sekarang disparitasnya sedemikian lebar. Usaha yang nampak menjadi luar biasa dengan menguras daya dan dana yang besar adalah alih status IAIN/STAIN menjadi UIN dalam rangka menyetarakan diri dengan perguruan tinggi di bawah asuhan Kemenristek-Dikti.

Wacana yang dikembangkan bersamaan dengan kehadiran UIN dan pendekatan interdisipliner dalam *Islamic studies* adalah upaya mengintegrasikan ilmu umum dan ilmu agama. Amin Abdullah mengajukan reintegrasi ilmu agama dan ilmu umum. Paradigma yang ingin dikembangkannya adalah teoantoprosentris-integralistik, dengan menjadikan agama, wahyu, sebagai teologi ilmu serta *grand theory* ilmu. Dengan ini ia ingin mengajukan paradigma keilmuan yang komprehensif yang dapat memenuhi dua hasrat epistemologis sekaligus yaitu ilmu-ilmu agama dan ilmu-ilmu umum. Dengan demikian diharapkan dikhotomi yang selama ini terjadi dapat didamaikan.⁸

Gairah untuk mempersatukan dua keilmuan ini menemukan momentumnya bersamaan dengan usaha agar tidak menjadi Perguruan Tinggi kelas dua setelah Perguruan Tinggi yang berada dibawah naungan Diknas sekaligus untuk meneguhkan identitas perguruan Tinggi Agama Islam agar berbeda dengan perguruan tinggi umum tersebut. Usaha untuk mengalihkan status IAIN menjadi UIN atau pembukaan Program Studi umum di PTAI adalah langkah awal yang dilakukan oleh para akedemisi dibawah naungan Kemenag

⁸ Lihat Amin Abdullah, “Reintregasi Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama” dalam *Perta*, vol. V/ no. 1/ 2002,48-5.

ini. Implikasi dari usaha untuk meneguhkan identitas ini adalah ‘keharusan’ memberi corak ‘profetis’ terhadap keilmuan umum yang dimasukkan dalam institusi pendidikan tinggi ini.

Ilmu umum dan agama yang berbeda induk epistemologinya ini, yang sedang diusahakan untuk didamaikan tersebut, seringkali saling menegasikan antara yang satu dengan yang lainnya, bahkan cenderung bersifat destruktif. Karena perbedaan epistemologis ternyata tidak sekedar masalah bagaimana dua ilmu ini akan diserap, tetapi lebih merupakan masalah yang berada diluar kontrol kesadaran epistemologis tersebut yang di dalamnya tersimpan reduksi atas pengetahuan manusia, karena benar dan tidaknya pengetahuan manusia ini “hanya” ditentukan oleh “mazhab epistemologis”nya. Demikian, wacana integralisasi ilmu agama dan umum ini telah disemarakkan melalui seminar dan naskah akademik di beberapa Jurnal untuk memenuhi gagasan tentang integrasi ilmu agama dan umum tersebut.⁹

Yang dimaksud dengan ilmu umum dan ilmu agama di sini adalah lebih merujuk pada dasar epistemologisnya, tidak untuk meneguhkan bahwa ilmu agama memiliki otoritas ketuhanan karena bersumber dari teks-teks agama dan karenanya memiliki tingkatan yang dan ilmu umum memiliki bermuatan sekuler sehingga menegasikan dogma dan doktrin agama sebagai pengetahuan. Karena jika yang dilakukan adalah peneguhan akan adanya otoritas ketuhanan dalam ilmu agama dan muatan sekuler dalam ilmu umum pasti akan terjebak pada hirarkhisasi ilmu pengetahuan manusia. Hirarkhisasi ilmu pengetahuan terjadi karena adanya pandangan bahwa satu ilmu lebih utama daripada ilmu lainnya karena

⁹ Wacana Islamisasi ilmu pengetahuan di mulai oleh al-Faruqi lihat dalam Isma’il Raji al Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan* ter. Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka, 1995), 21. Berikutnya, sejumlah nama seperti Seyyed Hossen Nasr, Syed al-Naqib Alatas dan beberapa kalangan lainnya, juga telah mengintrodusir kemungkinan integralisasi epistemologi ilmu agama dan pengetahuan umum. Sekedar contoh adalah tulisan Amin Abdullah “Reintegasi Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama” dalam *Perta*, vol. V/ no. 1/ 2002, juga masih penulis yang sama dalam buku *Integrasi Sains-Islam; Mempertemukan Epistemologi Islam dan Sains* (Yogyakarta: Pilar Media dan Suka Press, 2004) yang menggambarkan proses integrasi epistemologis ini dengan “Jaring laba-laba”-nya. Juga tulisan Imam Suprayogo dalam buku *Pendidikan Integralistik Memadu Sains dan Agama* (Malang: Bayu Media, 2003). Sebelumnya, di Indonesia, dalam istilah yang berbeda dan tujuan yang berbeda, Kuntowijoyo mengajukan gagasan atas terlahirnya ilmu sosial profetik. Lihat Kuntowijoyo, *Paradigma Islam interpretasi Untuk Aksi* (Bandung: Mizan, 1991)

sebenentuk pandangan hidup (*worldview*) yang disandangnya.¹⁰ Dengan demikian, berikutnya yang terjadi adalah hirarkhisasi terhadap pengetahuan yang didapatkan oleh manusia dengan memberi label kepada ilmu tersebut mana yang unggul dan mana yang tidak unggul. Karena alat ukur yang berbeda maka mengakibatkan unggul dan tidak unggul hanyalah sebuah klaim sepihak saja.

Maka dengan segala plus dan minusnya, dikhotomi yang dilakukan para ilmuwan atau siapapun tidak relevan untuk melakukan hirarkhisasi terhadap ilmu pengetahuan. Karena pastinya setelah terjadi hirarkhisasi ilmu tentunya akan terjadi hirarkhisasi ilmuwan yang menyandangnya. Hirarkhisasi ilmuwan tentu akan memiliki implikasi terhadap strata sosialnya. Di sinilah bermuara proses praktik diskursif ilmu pengetahuan manusia.

Pertarungan Praktik Diskursif dalam Ruang Publik “Ilmu Pengetahuan” Indonesia

Asumsi utama dalam diskursus sebagaimana yang dinyatakan oleh Foucault adalah bahwa memiliki wacana (*discourse*) merupakan cara satu-satunya untuk mengetahui realitas. Memahami pemikiran atau pernyataan haruslah menggunakan suatu wacana tertentu. Karena kita diharuskan menggunakan suatu wacana tertentu maka wacana tersebut menerapkan *kekuasaan* kepada kita. Dalam bahasa Jones, siapa kita—apa yang kita pikirkan, apa yang kita ketahui, apa yang kita katakan—diproduksi oleh berbagai wacana yang kita hadapi dan gunakan.¹¹ Jadi subyektivitas dan identitas manusia diciptakan oleh wacana-wacana di mana subyektivitas dan identitas itu dikandung. Dan karenanya wacana memberikan cara satu-satunya untuk “menjadi” seseorang. Jalinan antara pikiran, bahasa, pengetahuan, dan tindakan—di mana seluruhnya merupakan jejaring wacana—disebut praktik diskursif.¹² Karenanya praktik diskursif adalah jangkar sosial di mana ia menjadi tambatan bagi seluruh aktivitas sosial.

Ada banyak pengertian mengenai diskursus, dalam pengertian yang paling luas, wacana berarti sesuatu yang ditulis atau dikatakan atau dikomunikasikan dengan

¹⁰ Jika seseorang hidup dalam nuansa yang religius pastinya akan menomorduakan ilmu non-agama, sebaliknya jika seseorang hidup memiliki pandangan bahwa ilmu pengetahuan umum-lah yang telah menghantarkan manusia menuju kejayaannya hari ini pastilah ia akan menomorduakan ilmu agama.

¹¹ Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme* terj. Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), 203.

¹² Jones., 202.

menggunakan tanda-tanda, dan menandai hubungan yang lainnya dengan strukturalisme dan fokus-fokus dominannya pada bahasa. Namun menurut pengertian Foucault, wacana didefinisikan sebagai bidang dari semua pernyataan (*statement*), kadangkala sebagai sebuah individualisasi kelompok pernyataan, dan kadangkala sebagai praktek regulatif yang dilihat dari sejumlah pernyataan.¹³

Foucault mendefinisikan strategi kekuasaan sebagai melekat pada kehendak untuk mengetahui. Melalui wacana, kehendak untuk mengetahui terumus dalam pengetahuan. Wacana bukan muncul begitu saja akan tetapi diproduksi oleh zamannya masing-masing. Menurut Foucault, pandangan kita tentang suatu objek dibentuk dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh struktur diskursif tersebut; wacana dicirikan oleh batasan bidang dari objek, definisi dari perspektif yang paling dipercaya dan dipandang paling benar. Persepsi kita tentang suatu objek dibatasi oleh praktek diskursif.¹⁴

Dalam koteks ini kuasa senantiasa hadir dalam wacana atau diskursus. Dalam hal ini *discursive-practice* (praktik diskursif) yang ditarik dari karya-karya Michael Foucault, akan membuka lebih banyak kemungkinan bagi analisis terhadap wacana serta kaitannya dengan praksis politik. Sebab, salah satu keunggulan dari penghampiran *discursive-practice* adalah kepekaannya terhadap kuasa yang dianggap senantiasa hadir dalam setiap wacana. Dengan menggunakan penghampiran demikian, setiap wacana lantas disikapi sebagai sesuatu yang terbuka untuk dikaji dari segenap sudut baik yang mudah dikenali atau yang tersembunyi dan baik dari posisi yang berkuasa maupun yang dikuasai. Upaya penghampiran ini akan membantu menunjukkan bukan saja bagaimana makna diproduksi dan direproduksi dalam wacana, tetapi juga bagaimana suatu wacana-tandingan (*counter-discourse*) dibuat dan ditampilkan. Kuasa, demikian Foucault, dalam dirinya senantiasa juga mengandaikan perlawanan (*resistance*). Lewat wacana tertentu hubungan-hubungan kekuasaan diciptakan dan didistribusikan dalam batang tubuh masyarakat, demikian pula lewat wacana tertentu diandaikan keberadaannya dan bahkan diciptakan. *Dicursive-practice* sebagai penghampiran akan membuka banyak kemungkinan bagi kita dalam melakukan eksplorasi yang jauh dalam

¹³ Lydia. "Foucault Untuk Pemula" (Yogyakarta: Kanisius, 2001) 100.

¹⁴ Syafieh Yanti, "Pengetahuan dan Kekuasaan dalam Perspektif Foucault" dalam <https://syafieh.blogspot.com/2013/03/pengetahuan-dan-kekuasaan-dalam.html> diunduh tanggal 29-10-2017

rangka interpretasi makna yang di dalamnya melibatkan pula proses-proses hegemoni dan hegemoni-tandingan (*counter-hegemony*).¹⁵ Praktik diskursif ini berlangsung dalam satu ruang kontestasi yang umumnya disebut dengan *public sphere* atau ruang publik. Jürgen Habermas menjelaskan bahwa ruang publik (*public sphere*) merupakan media untuk mengomunikasikan informasi dan juga pandangan. Ruang publik tersebut pada dasarnya merupakan ruang yang tercipta dari kumpulan orang-orang tertentu seolah-olah sebagai bentuk penyikapian terhadap otoritas publik.¹⁶ Meski demikian, Habermas menegaskan bahwa sesungguhnya ruang publik adalah sebuah ruang otonom dari negara dan pasar. Ia otonom karena tidak hidup dari kekuasaan administratif maupun ekonomi kapitalis, melainkan *lebenswelt* atau *civil society*. Tetapi lebih lanjut Habermas menegaskan bahwa ruang publik merupakan arena diskursif, yang berbeda dan terpisah dari ekonomi dan negara, di mana melaluinya para warga berdialog dan berpartisipasi dan bertindak melalui dialog dan debat.¹⁷

Memasukkan pengetahuan dalam ruang publik bukanlah perkara yang tidak memiliki landasan logisnya. Hal ini bermula dari klaim validitas universalnya ilmu alam yang merangsek pada seluruh landasan berpengetahuan manusia. Ciri umum berpikir ilmiah sesungguhnya adalah hasil dari klaim validitas universal ini, yang pada gilirannya membantu dalam meyebarakan ideologi masyarakat industri. Ignas Kleden, dengan mengacu pada Habermas, menyatakan bahwa klaim validitas universal amat didukung oleh universalisasi-universalisasi kepentingan teknis yang pada gilirannya memberikan nilai tertinggi kepada kerja manusia yang membenarkan industrialisasi yang berorientasi pada penguasaan dan kontrol teknis atas alam dan masyarakat.¹⁸

Selanjutnya kini kita dapat memahami klaim validitas universal ini berkembang. Ilmu pengetahuan, industri dan masyarakat industri merupakan jejak logis yang ditapaki peradaban

¹⁵ Muhammad A.S, Hikam, “Bahasa dan Politik: Penghampiran ‘Discursive-Practice’” dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (Bandung: Mizan, 1996) 86.

¹⁶ Secara genealogis Habermas menguraikan bahwa dalam *city-state* Yunani Kuno, Ruang (*sphere*) dalam pengertian *polis*, yang terbuka bagi masyarakat merdeka. Ruang publik sejatinya adalah *bios politikos* (kehidupan politik/publik) di mana berlangsung diskusi-diskusi (*lexis*) ataupun tindakan bersama (*praxis*) saat perang ataupun berkompetisi. Jürgen Habermas, *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Ruang Publik*. Terj. Yudi Santoso (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 1989). 4.

¹⁷ Gusti A. B. Menoh, *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jürgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2015) 85.

¹⁸ Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan* (Jakarta: LP3ES, 1987) 5.

Barat dalam kurun waktu 200 tahun lebih.¹⁹ Hal ini terjadi atas dua alasan yakni: pertama, masyarakat baru yang didasarkan atas ilmu pengetahuan dan industri/teknologi dianggap lebih baik dari masyarakat yang dibangun atas kekuatan agama dan militer. Kedua, cara berpikir ilmiah diambil sebagai model universal bagi segala jenis sistem kognitif, yang dapat diterima oleh bangsa dan kebudayaan manapun dan harus menjadi satu-satunya metode dalam menangani segala masalah, termasuk agama, moral dan budaya.²⁰

Ilmu pengetahuan muncul dalam peradaban Barat secara hegemonik telah memaklumkan dirinya sebagai satu-satunya pemenang dan memperoleh legitimasi sosio-intelektual pada abad 19. Mulailah terjadi hirarkisasi makna, sekurang-kurangnya menurut ilmuwan ilmu alam yang mengklaim ada ilmu yang pasti (*science* = ilmu alam) dan ilmu yang tidak pasti. Dengan begitu “ilmu” tanpa imbuhan apapun telah disamakan terutama—seringkali secara eksklusif—bermakna ilmu alam.²¹ Dengan demikian perebutan legitimasi sebagai ilmu yang menandai kontestasi dari praktik diskursif politik pengetahuan telah bermula dalam sejarah peradaban Barat. Dan ilmu alam telah memenangkannya dalam rentang waktu yang amat panjang.

Dalam pada itu, ilmu-ilmu sosial sudah sedemikian jauh meninggalkan dan menanggalkan filsafat sebagai induk ilmu pengetahuan dengan tanpa kompromi sedikitpun.²² Hal ini terjadi karena ilmu-ilmu sosial menemukan akar historisnya pada dimensi realitas yang menuntunnya untuk terus melakukan adaptasi-adaptasi faktual.

Awalnya, pada ilmu-ilmu sosial diajukan pola pemikiran deterministik sehingga diharapkan mampu mendapatkan hukum-hukum (*laws*) keteraturan sehingga kepastian akan pengetahuan sosial dapat dipertanggung jawabkan. Asumsi yang dikembangkan tentang kehadiran hukum-hukum deterministik yang diklaim oleh ilmu-ilmu eksak dan hendak

¹⁹ Kleden, 4.

²⁰ Kleden, 4.

²¹ Immanuel Wallerstein, *Lintas Batas Ilmu Sosial* ter. Oscar (Yogyakarta: LKiS, 1997) 7-8

²² Bahkan Bachelard, filosof Prancis, mengatakan bahwa jika filsafat masih berkehendak untuk eksis, maka ia harus ‘mengalah’ pada ilmu pengetahuan dan menjadi ‘prajurit’ ilmu pengetahuan, jika hal ini tidak dilakukan, maka filsafat harus bersiap untuk menggali lubang kuburnya sendiri. Lebih jelasnya ia mengatakan: “ilmu pengetahuan sungguh-sungguh menciptakan filsafat. Filsafat harus belajar dari ilmu pengetahuan dan tidak boleh berusaha untuk menguasai ilmu pengetahuan dengan mengeluarkan petunjuk-petunjuk atau aturan-aturan.” Lihat K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, (Jakarta: Gramedia, 2001), 165.

diadopsi oleh kalangan ilmuwan ‘ $a > b$ ’ August Comte dengan *Fisika Sosial*-nya, ternyata harus diingsutkan oleh realitas bahwa kehidupan sosial tidak akan terbaca oleh hukum-hukum fisik tersebut.

Namun demikian ilmu-ilmu sosial telah memapankan dirinya dengan berbagai cara yang di antaranya adalah dengan mengubah pola determinisme absolut menuju determinisme statistika. Berikutnya pemikiran deterministik ini banyak ditinggalkan kalangan ilmuwan sosial yang kemudian menggantinya dengan probabilitas. Untuk itu, “probabilitas relatif” menjadi istilah penting dalam mengembangkan ilmu-ilmu sosial.²³ Penciptaan beragam disiplin ilmu sosial ini merupakan bagian dari upaya umum abad kesembilanbelas untuk melindungi dan memajukan ilmu pengetahuan obyektif tentang realitas atas dasar penemuan-penemuan empiris (yang bertentangan dengan spekulasi).²⁴ Dengan demikian ilmu sosialpun tidak mau ketinggalan dengan ilmu pasti dalam rangka ikut menentukan ke mana peradaban dunia diarahkan. Bahkan pembagian wewenang menjadi hal yang niscaya. Ilmu pasti melakukan eksplorasi terhadap alam sebagai obyek dan sekaligus menaklukkannya, sedangkan ilmu sosial mengeksplorasi manusia dari berbagai dimensinya dan sekaligus menaklukkannya.

Ada baiknya jika merenungkan apa yang disampaikan Wallerstein tentang perseteruan ilmu sosial dan ilmu alam, ia mengatakan:

‘Perjuangan epistemologis’ atas apa yang merupakan pengetahuan yang sah (*legitimate*) bukan lagi perjuangan terhadap siapa yang akan mengendalikan pengetahuan tentang alam (ilmuwan alam jelas telah memenangkan hak-hak eksklusif atas domain ini sejak abad kedelapanbelas), tetapi mengenai siapa yang akan mengendalikan pengetahuan tentang dunia manusia.²⁵

Demikian halnya pengetahuan yang telah terinstitusionalisasi dalam perguruan tinggi tersebut. Masing-masing memperebutkan makna kebenaran dan kemenangannya sendiri. Menjadi Universitas Islam dengan beragam program studi umum merupakan poin penting dalam rangka membesarkan PTKI. Dari sini mulai berlaku kontestasi tentang siapa yang akan mengendalikan pengetahuan tentang dunia manusia.

²³ Lihat Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* ter. Daniel Dhakidae (Jakarta: PT RajGrafindo Persada dan YIIS, 1996), 2-5.

²⁴ Wallerstein, *Lintas...*, 20.

²⁵ Wallerstein, *Lintas ...*, 9

Karenanya barangkali benar anggapan Chris Barker yang menyatakan bahwa para pemikir Cultural Studies memandang bahwa produksi pengetahuan teoritis sebagai praktik politik. Pengetahuan tidak pernah menjadi fenomena netral atau obyektif, melainkan soal posisionalitas, persoalan darimana seseorang berbicara, kepada siapa dan demi tujuan apa.²⁶ Barangkali masuknya Amin Abdullah dalam Asosiasi Ilmu Pengetahuan Indonesia adalah ‘kemenangan’ praktik diskursif yang selama ini dimainkannya. Rekrutmen keanggotaannya yang elit ini membuat tidak banyak ilmuwan yang bisa masuk di dalamnya. Hari ini hanya ada 61 anggota dari organisasi para ilmuwan Azyumardi Azra adalah nama lain dari PTKI yang juga masuk di dalam asosiasi mentereng ini.

Kemenangan ini bisa berarti pengakuan oleh kalangan elit ilmuwan atas rekam jejak ilmiah yang ditorehkan Amin Abdullah dalam dunia keilmuan. Bagaimana ia menorehkan ragam pemikiran dan menjejalkan integrasi-interkoneksi dalam ruang publik pengetahuan Indonesia. Praktik diskursif (*discursive practices*) sebagai proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks dipandang penting sebagai sebuah medium dan pergulatan kuasa, dan konstruksi sosial.²⁷

Kesimpulan

Praktik diskursif²⁸ “Integrasi-Interkoneksi Ilmu Pengetahuan” yang dimainkan oleh Amin Abdullah sebagai pergulatan intelektualisme di Indonesia. Dimulai dengan membongkar epistemologi dan metodologi pengetahuan keagamaan lalu menawarkan konsepsi integrasi-interkoneksi agama dan sains ia telah menempatkan universitas Islam negeri dalam posisi yang terhormat ketika ‘memungut’ program studi yang selama ini menjadi hak eksklusif perguruan tinggi umum. Tidak hanya ‘dipungut’ paksa dan dicangkokkan begitu saja dalam PTKI, tetapi keilmuan yang dikembangkan memiliki nilai distingtif dengan yang

²⁶ Chris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktek* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004) 6.

²⁷ Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke 20* (Bandung: Mizan, 2005) 59.

²⁸ Sesungguhnya jika persektif ini memakai *inward looking* (melihat dari dalam perjuangan untuk menyejajarkan dengan perguruan tinggi umum secara diskursif) yang dilakukan oleh M. Amin Abdullah dengan integrasi-interkoneksinya adalah termasuk bagian dari *counter-discursive*. Tetapi jika menelisik dari perspektif *outward looking* di mana Amin Abdullah juga menjajakan diskursus integrasi-interkoneksi ke banyak PTKI maka hal itu termasuk *discursive-practice*. Tetapi *discursive-practice* maupun *counter-discursive* memiliki *modus operandi* yang sama.

berada di perguruan tinggi umum. Dari sini bermula dari praktik diskursif menuju praktik politik pengetahuan. Hal ini tentu juga menguntungkan kepada kementerian agama untuk mengangkat derajat perguruan tinggi yang dinaunginya yang selama ini dianggap perguruan tinggi kelas dua. Dengan menyandang nama Universitas Islam mereka mulai bersaing dan berkontestasi tidak hanya dengan perguruan tinggi umum di Indonesia, tetapi juga dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Chris Barker, *Cultural Studies: Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2004.
- Gusti A. B. Menoh, *Agama Dalam Ruang Publik: Hubungan anantara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Ignas Kelden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Imam Suprayogo dalam buku *Pendidikan Integralistik Memadu Sains dan Agama*. Malang: Bayu Media, 2003. Kuntowijoyo, *Paradigma Islam interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.
- Immanuel Wallerstein, *Lintas Batas Ilmu Sosial* ter. Oscar. Yogyakarta: LKiS, 1997.
- Isma'il Raji al Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan* ter. Anas Mahyuddin. Bandung: Pustaka, 1995.
- Jurgen Habermas, *Ruang Publik: Sebuah Kajian Tentang Kategori Ruang Publik*. Terj. Yudi Santoso. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 1989.
- K. Bertens, *Filsafat Barat Kontemporer Prancis*, Jakarta: Gramedia, 2001.
- Lydia. "Foucault Untuk Pemula". Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- M. Amin Abdullah, "Membangun Kembali Filsafat Ilmu-ilmu Keislaman: Tajdid dalam Perspektif Filsafat Ilmu" dalam A. Syafi'i Ma'arif, dkk., Tajdid Muhammadiyah untuk Pencerahan Peradaban, (ed.) Mifedwil Jandra dan M. Safar Nasir. Yogyakarta: MT PPI & UAD Press, 2005.
- , "Etika *Taubidik* sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama (Dari Paradigma Positivistik-Sekularistik ke arah Teoposentrik-Integralistik) dalam M. Amin Abdullah, dkk. *Integrasi Sains-Islam: Mempersatukan Epistemologi Islam dan Sains*. Yogyakarta: Suka Press, 2004.
- , "Reintegasi Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama" dalam *Perta*, vol. V/ no. 1/ 2002.
- , *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkonektif*, Adib Abdushomad (ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- , *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* (Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996). v.
- , *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas?* Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

- Maurice Duverger, *Sosiologi Politik* terj. Daniel Dhakidae. Jakarta: PT RajGrafindo Persada dan YIIS, 1996.
- Muhammad A.S, Hikam, “Bahasa dan Politik: Penghampiran ‘Discursive-Practice’” dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim (ed.), *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan, 1996.
- Pip Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme Hingga Post-Modernisme* terj. Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Richard C. Martin, “Islam and Religious Studies: An Introductory Essay” dalam *Martin Approach to Islam in Religious Studies*. Arizona: The University of Arizona Press, 1985.
- Syafieh Yanti, “Pengetahuan dan Kekuasaan dalam Perspektif Foucault” dalam <https://syafieh.blogspot.com/2013/03/pengetahuan-dan-kekuasaan-dalam.html> diunduh tanggal 29-10-2017
- Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-...)*. Yogyakarta: SUKA-Press, 2013.
- Yudi Latif, *Intelegensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Intelegensia Muslim Indonesia Abad ke 20*. Bandung: Mizan, 2005.



Jurnal Ilmiah Spiritualis (JIS)
Jurnal Pemikiran Islam dan Tasawuf

